

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah yang ada di laut semakin tidak terbendung. Hal ini menimbulkan dampak kerusakan pada kehidupan laut. Kajian Universitas Georgia yang dirilis tahun 2016 menyatakan bahwa lautan di Indonesia merupakan perairan kedua di dunia yang menyimpan banyak sampah plastik terbanyak. 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun, sekitar 80% berasal dari aktivitas industri, saluran pembangunan, limbah yang tidak diproses dan pariwisata. Jika masalah plastik dibiarkan, maka akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor kelautan.

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), sampah laut adalah benda padat yang dihasilkan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dibuang di dalam lingkaran laut. Sampah laut (*marine debris*) terutama dari jenis plastik telah menjadi masalah yang signifikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. *United Nations Environment Programme (UNEP)*, menjelaskan bahwa banyak sampah laut berasal dari aktivitas di darat, seperti operasi penangkapan ikan, galangan kapal (*dock shipyard*), dan limbah dari rekreasi pantai. Selain itu, faktor alam juga dapat menyebabkan sampah laut tenggelam karena banjir yang mengangkut sampah

di pesisir dengan arus laut.¹ Akibat negatifnya, hal ini menimbulkan ancaman terhadap ekosistem laut, pariwisata, perekonomian hingga perubahan iklim.

Sampah laut di Indonesia merupakan masalah besar dan menjadi penghasil sampah plastik terbesar kedua yang dibuang ke laut setelah Cina. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), setiap harinya Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah atau 189 ribu ton sampah per hari. Sebagian besar sampah ini dibuang langsung ke perairan, sampai akhirnya berada di laut.² Pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang sampah yang menyebabkan akumulasi sampah laut. Masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang sampah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen sampah laut. Penanganan sampah perumahan membutuhkan keterlibatan aktif dari individu dan kelompok masyarakat serta peran pemerintah sebagai penyedia layanan, sarana dan prasarana.

Ketidakseimbangan alih fungsi lingkungan sebagai tempat tinggal makhluk hidup, berkontribusi pada kerusakan lingkungan itu sendiri. Manusia dengan faktor mobilitas pertumbuhan dan kognitifnya dengan segala perkembangan kebudayaan merupakan faktor yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup selalu ada untuk memungkinkan makhluk hidup bertahan hidup. Maka melakukan sesuatu

¹ Azharil, M.Y., "Bahaya Sampah Plastik di Laut Bagi Makhluk Hidup", *Riset dan Teknologi Kelautan*, Vol. 6, No. 2, (November 2023), hlm. 173

² Sukib, S., "Meningkatkan Kesadaran Bahaya Sampah Laut melalui Pendampingan pada Masyarakat Lokasi Wisata Pantai Kuranji", *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, Vol. 2, No. 2, (Januari 2020), hlm. 103

yang merusak lingkungan hidup sama dengan secara tidak langsung menghancurkan seluruh kehidupan di bumi.³

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut, sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan laut. Sampah laut terdapat di semua habitat laut, mulai dari kawasan-kawasan padat penduduk hingga lokasi-lokasi terpencil yang tidak terjamah manusia, dan pesisir dan kawasan air dangkal hingga palung-palung laut. Kepadatan sampah laut beragam dari satu lokasi lain, dipengaruhi oleh kegiatan manusia, kondisi perairan atau cuaca, struktur dan perilaku permukaan bumi, titik masuk dan karakteristik fisik dan materi sampah.⁴

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa 80% sampah yang dibuang ke laut berasal dari daratan dan 90% merupakan sampah plastik. Sampah laut akan menghancurkan ekosistem yang menyerap karbon seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Adanya sampah menyebabkan biota laut berkarang, sehingga dapat menyebabkan pendapatan nelayan menurun, dan sampah mengganggu aktivitas penangkapan ikan.⁵ Berdasarkan survei yang dilakukan KLHK tahun 2017, komposisi sampah laut berukuran meso (0,5-2,5 cm) yang didominasi oleh kayu (35,06%) dan plastik (24,96%), sedangkan yang

³ Suparni, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 21

⁴ Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Sampah Laut (Marine Debris)*, <https://kkp.gp.id/djprl/p4k/page/page/1994-sampah-laut-marine-debris> diakses pada 8 Oktober 2023

⁵ Albansa, S., El Mahrad, B., Vondolia, G. K., Icely, J., & Newton, A., "The Marine Plastic Litter Issue: a Social-Economic Analysis", *Sustainability*, Vol. 12, No. 20, (Oktober 2020), hlm. 27

berukuran makro (>2,5 cm) didominasi oleh plastik (31,44%) dan kayu (29,75%). Sampah laut terdiri dari material organik dan anorganik yang padat dan tidak mudah terurai yang dibuang dan menumpuk serta menyebar di permukaan laut dan pantai.

Sampah plastik di lautan Indonesia diperkirakan mencapai 187,2 juta ton per tahun. Plastik adalah polimer hidrokarbon rantai panjang yang terdiri atas jutaan monomer yang saling berkaitan dan tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sampah plastik membutuhkan waktu 200 sampai 1000 tahun untuk dapat terurai. Sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran terhadap tanah, air, dan makhluk bawah tanah. Polimer plastik yang ada di laut akan rusak menjadi potongan plastik kecil karena berbagai macam faktor seperti paparan sinar ultraviolet, bakteri, suhu panas tinggi dan abrasi. Mikroplastik yang berupa material partisi kecil yang berukuran 5 mm atau lebih kecil merupakan jenis fiber hasil dari pelapukan pakaian akibat pencucian. Dengan ukuran mikroplastik yang kecil, memiliki kemungkinan terjadinya bioakumulasi mikroplastik dengan biota perairan. Racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan pengurai di dalam tanah. *Polychlorinated Biphenyls* (PCB) yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun sesuai urutan rantai makanan.

Kabupaten Pangandaran adalah bagian paling tenggara dari Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 101.092 Ha yang terkenal dengan keindahan pantainya. Letak geografi Kabupaten Pangandaran berada pada 108°40'

sampai 108°40' BT dan 70°40'20" sampai 70°50'20" LS. Kabupaten Pangandaran terdiri dari sepuluh kecamatan, dan enam diantaranya berbatasan langsung dengan garis pantai samudera Indonesia yang memiliki panjang garis pantai 91 km. Wilayah pesisir Pangandaran menghadapi masalah serius terkait pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah laut (*marine debris*). Sampah yang mencemari laut tidak hanya mengancam ekosistem maritim, tetapi mengganggu kesehatan masyarakat dan merugikan ekonomi lokal yang bergantung pada sektor pariwisata dan perikanan. Jika pertumbuhan bisnis di daerah wisata Kabupaten Pangandaran dikelola secara konvensional dan tidak berkelanjutan, hal ini akan berdampak negatif pada Pencemaran laut di Pangandaran disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perilaku membuang sampah sembarangan oleh wisatawan dan penduduk lokal, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, serta arus laut yang membawa sampah dari daerah lain. Selain itu, kegiatan perikanan dan industri di kawasan pesisir juga turut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah sampah yang berakhir di laut. Dampak dari pencemaran laut dapat mengurangi daya tarik wisatawan, merusak sumber daya alam, dan mengancam keberlanjutan ekonomi yang bergantung pada sektor pariwisata dan perikanan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran, menjelaskan bahwa volume sampah di kawasan Pantai Pangandaran secara keseluruhan sekitar 300 ton per hari. Masalah ini disebabkan oleh pengelolaan sampah yang tidak tepat saat berada di daratan.

Sampah-sampah yang berada di kawasan Pangandaran merupakan kiriman dari berbagai hulu sungai yang ada di Pangandaran. Data BPS tahun 2020 mencatat Kabupaten Pangandaran memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 4,4% dari tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap kabupaten di Provinsi Jawa Barat yaitu 4,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata Kabupaten Pangandaran terus berkembang dan mempunyai banyak potensi untuk menjadi semakin maju, karena banyak potensi yang belum dikembangkan.

Penanggulangan sampah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur ketentuan-ketentuan tentang penanganan sampah di kawasan wisata, penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan pengelolaan sampah serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan menggunakan kembali, mendaur ulang, dan pengelolaan akhir sampah.⁶ Ketersediaan tempat sampah di kawasan wisata di Pangandaran tidak ada perawatan secara baik oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pantai sehingga tempat sampah tersebut rusak. Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah pesisir Pantai Pangandaran karena tidak ada fasilitas pembuangan sampah yang memadai, lemahnya dan terbatasnya dukungan dari masyarakat setempat, dan belum efektifnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

Untuk menghadapi masalah ini, diperlukan langkah-langkah penanggulangan yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama dengan pihak terkait, telah berupaya mengatasi masalah ini melalui edukasi yang berkelanjutan, penguatan regulasi, serta inovasi dalam pengelolaan sampah menjadi kunci dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Pangandaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT SAMPAH LAUT DI PANGANDARAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan pencemaran lingkungan akibat sampah laut di Pangandaran berdasarkan Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Apa saja faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat sampah laut di Pangandaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat sampah laut di Pangandaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat sampah laut di Pangandaran

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan informasi yang lebih jelas mengenai pencemaran lingkungan, beserta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat sampah laut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis terhadap Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Laut di Pangandaran Berdasarkan Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolan Sampah.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam optimalisasi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Laut di Pangandaran Berdasarkan Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.